

Dr. Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, MM, MT, IPU

# Sistem PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

---

Pelatihan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah  
Angkatan XXIX Tahun 2021

WIDYAISWARA  
AHLI MADYA

**B P S D M**  
PROVINSI DKI JAKARTA  
[mahendrawirawan@gmail.com](mailto:mahendrawirawan@gmail.com)

Dr. Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, MM, MT, IPU





# DASAR HUKUM

- 1 UU No.17 Tahun 2003
- 2 UU No.25 Tahun 2004
- 3 UU No.23 Tahun 2014
- 4 PP No.8 Tahun 2008
- 5 PP No.12 Tahun 2019
- 6 Permendagri No.13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali dirubah.
- 7 Permendagri No.86/2017







# Pemahaman Perencanaan

APA YANG DIMAKSUD DENGAN  
PERENCANAAN .....

# Perencanaan

PP No. 8 Tahun 2008

Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia





# FUNGSI JAKARTA

## DAERAH OTONOM (UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah)

## IBU KOTA NKRI (UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI)

### 1. Urusan Wajib (24)

#### ➤ Pelayanan Dasar (6)

- Pendidikan
- Kesehatan
- PU dan TR
- Perkim
- Trantib, Linmas
- Sosial

#### ➤ Non Pelayanan Dasar (18)

- Naker
- Pemberdayaan PA
- Pangan Modal
- Pertanahan
- LH
- Admindukcapil
- Pemberdayaan masy desa
- Dalduk & KB
- Perhubungan
- Kominfo
- KUKM
- Penanaman
- Kepemudaan & OR
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Arsip

### 2. Urusan Pilihan (8)

- Kelautan & perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan
- ESDM
- Perdagangan
- Perindustrian
- Pariwisata

1. TR, SDA dan LH
2. Kependudukan dan Kim
3. Transportasi
4. Indag
5. Pariwisata

APBN

APBD



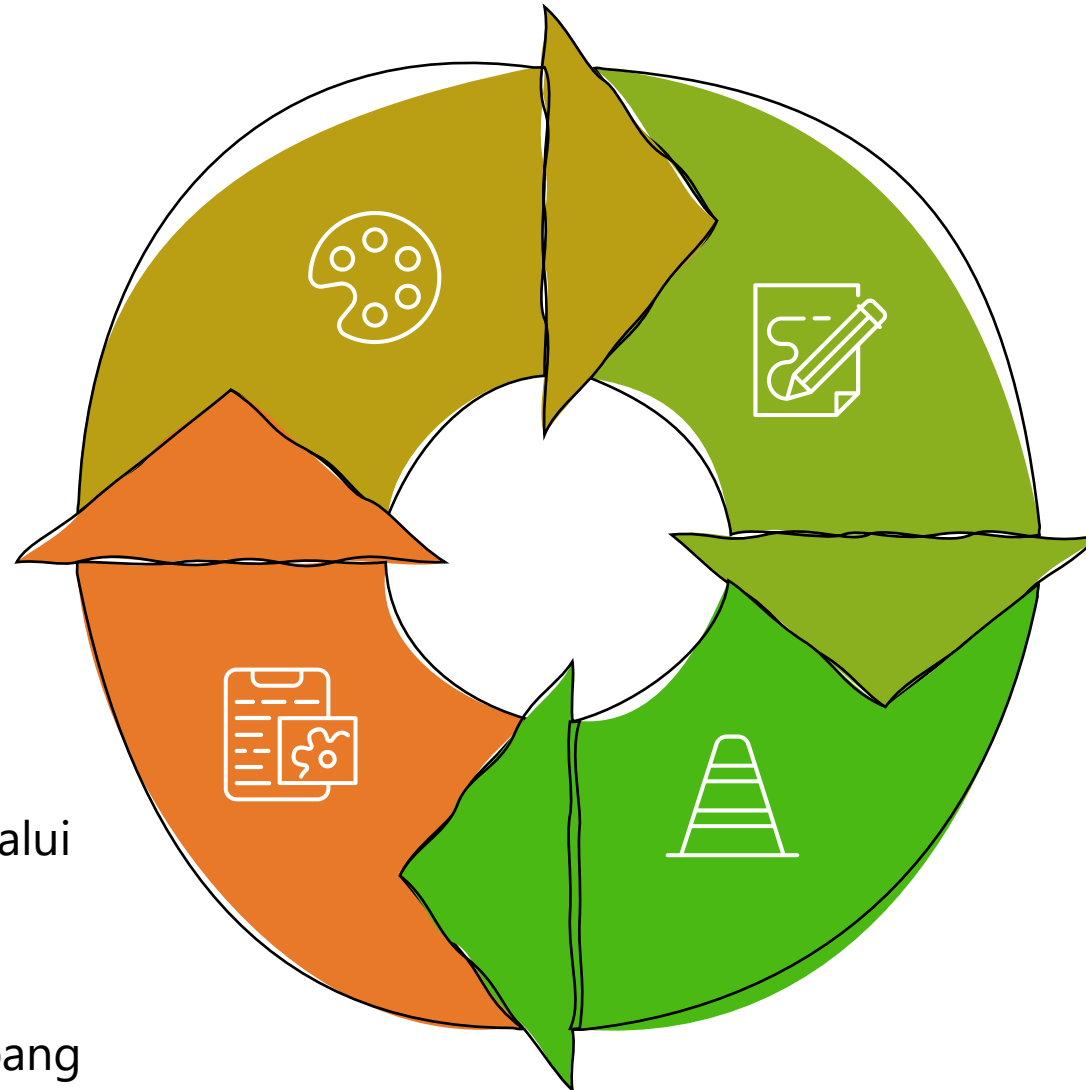
# PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN

## POLITIS

KETERLIBATAN DPRD  
Pembahasan Raperda  
RPJMD dengan DPRD

## BOTTOM UP/ TOP DOWN

- MASYARAKAT  
Penjaringan aspirasi melalui  
forum konsultasi publik
- PEMERINTAH  
Antisipasi isu aktual dan  
kebijakan yang berkembang



## TEKNOKRATIS

ILMIAH

Pengkajian seluruh dokumen  
yang menjadi pedoman  
penyusunan (**Evaluasi  
sebelumnya, RPJMD, RPJPD,  
RTRW, RRPJPN, RPJMN, RKP.**)

## PARTISIPATIF

PELIBATAN STAKEHOLDER

Pelaksanaan Musrenbang  
yang melibatkan seluruh  
pemangku kepentingan  
(**Daerah sekitar, K/L,  
Asosiasi Profesi, Pakar,  
Akademisi, LSM, NGO dll.**)

# Pendekatan Susbtansi

## Holistik Tematik

Satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan



## Integratif

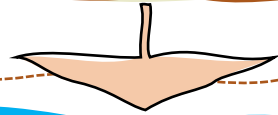
Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas

## Spasial

Mempertimbangkan dimensi keruangan



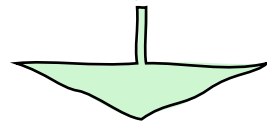
RPJPD  
(20 tahunan)



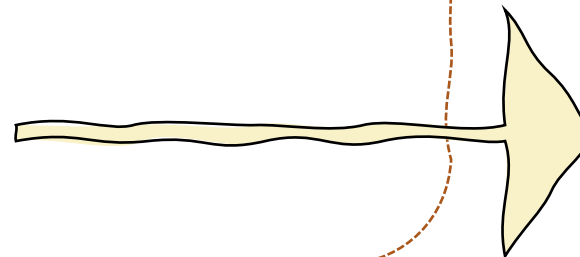
Penjabaran Visi Misi Gubernur terpilih (5 tahunan)



Penjabaran RPJMD sesuai Tusi SKPD (5 tahunan)



RKPD  
(tahunan)



# Perencanaan dan Penganggaran

APBD  
(tahunan)

Perencanaan

Penganggaran

# RPJPD

## Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk **20 (dua puluh) tahun** yang disusun dengan berpedoman pada **RPJPN** dan **RTRW**



# RPJPD DKI JAKARTA 2005 - 2025





# RPJMD

## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** yang disusun dengan berpedoman pada **RPJPD**, **RTRW** dan **RPJMN**



# RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

## UU No.25/2004

RPJMD yang merupakan penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah ditetapkan dengan **Peraturan Kepala Daerah** paling lama **3 bulan** setelah Kepala Daerah terpilih dilantik

## UU 23/2014

**Perda** tentang RPJMD ditetapkan paling lama **6 (enam) bulan** setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.



RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017-2022

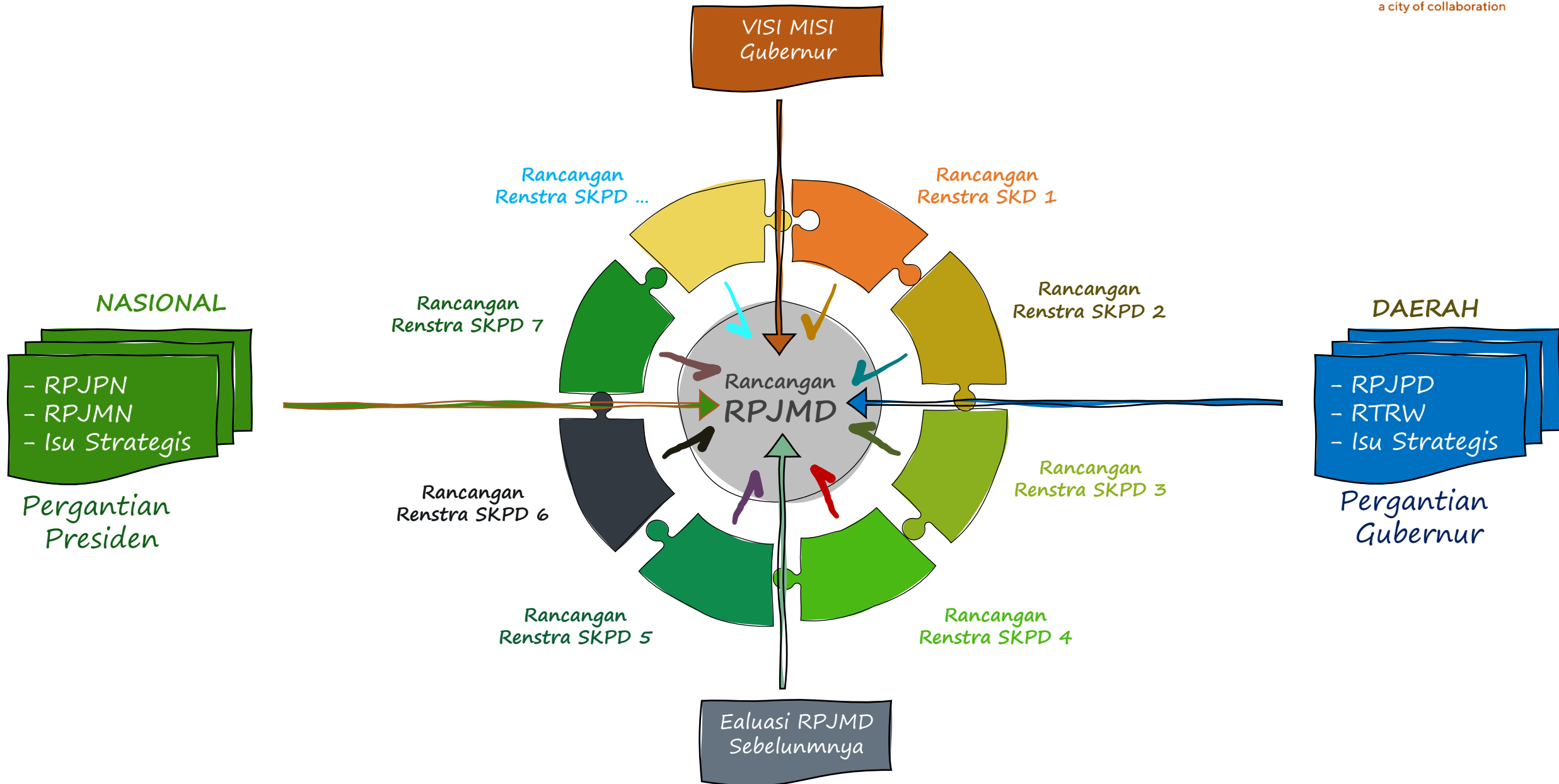
# Muatan RPJMD

JAKARTA  
2022

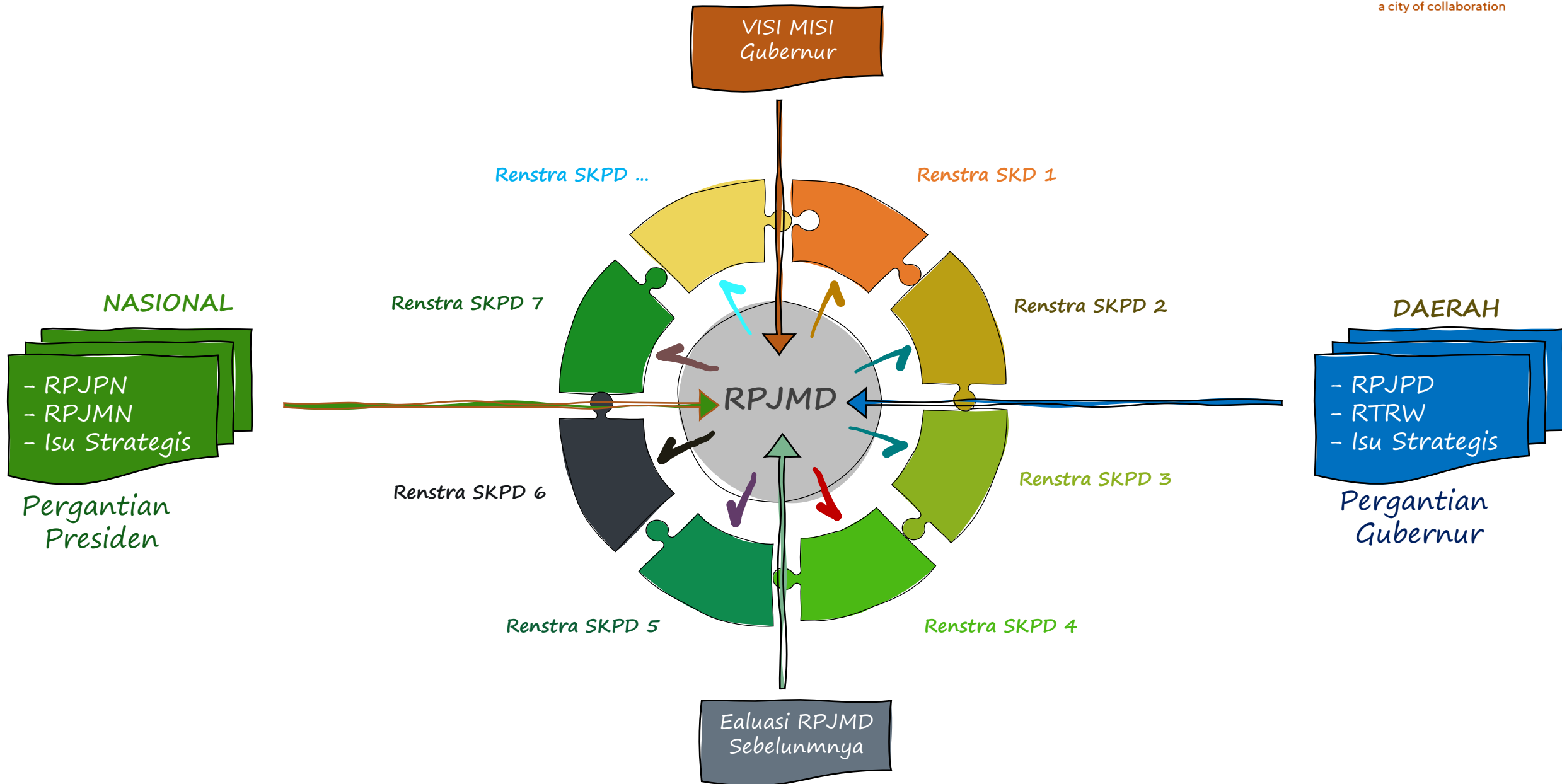




# Proses Penyusunan RPJMD



# Proses Penyusunan RPJMD





## VISI

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua

## MISI

1. Menjadikan Jakarta kota aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memeberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakn.
2. Menjadikan Jakarta kota memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya , mengabdikan dan melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis, dan berintergritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibu kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.



# RKPD

## Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** yang disusun dengan berpedoman pada **RKP** dan **program strategis nasional** yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

# Siklus Perencanaan & Penganggaran



Banggar DPRD



TAPD



Gubernur



Kebijakan Umum APBD –  
Prioritas Plafon Anggaran Sementara  
(KUA PPAS)  
Paling lambat disampaikan ke DPRD  
Minggu 2 Juli

Kebijakan Umum APBD –  
Prioritas Plafon Anggaran  
(KUA PPA)  
Disepakati Gubernur dan DPRD  
Minggu 2 Agustus

Rencana Kerja dan Anggaran  
(RKA)  
Satuan Kerja Pemerintah  
Daerah (SKPD)

Rancangan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja  
(APBD)  
disampaikan ke DPRD  
paling lambat  
minggu 2 September

TAPD



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
untuk pedoman penetapan  
Rencana Kerja (Renja) SKPD  
Ditetapkan paling lambat  
akhir Juni



Rancangan APBD dibahas  
DPRD dan ditetapkan  
paling lambat  
akhir November

BAPPEDA



Kelurahan → Januari  
Kecamatan → Februari  
Kota/Kabupaten → Minggu 4 Maret  
Provinsi → Minggu 2 April



APBD  
Dilaksanakan



Raperda APBD  
Diperbaiki oleh Gubernur  
dan DPRD untuk ditetapkan  
menjadi Perda APBD paling  
lambat  
akhir Desember



Raperda APBD  
Disampaikan ke Kemendagri  
untuk dievaluasi dan  
disampaikan kembali ke  
Gubernur selambatnya  
Pertengahan Desember

Referensi

Dievaluasi



SKPD



Mendagri



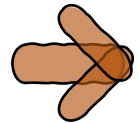
# Penganggaran

Apa yang  
dimaksud dengan  
APBD..?





# Pengertian APBD



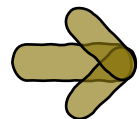
- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD



- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

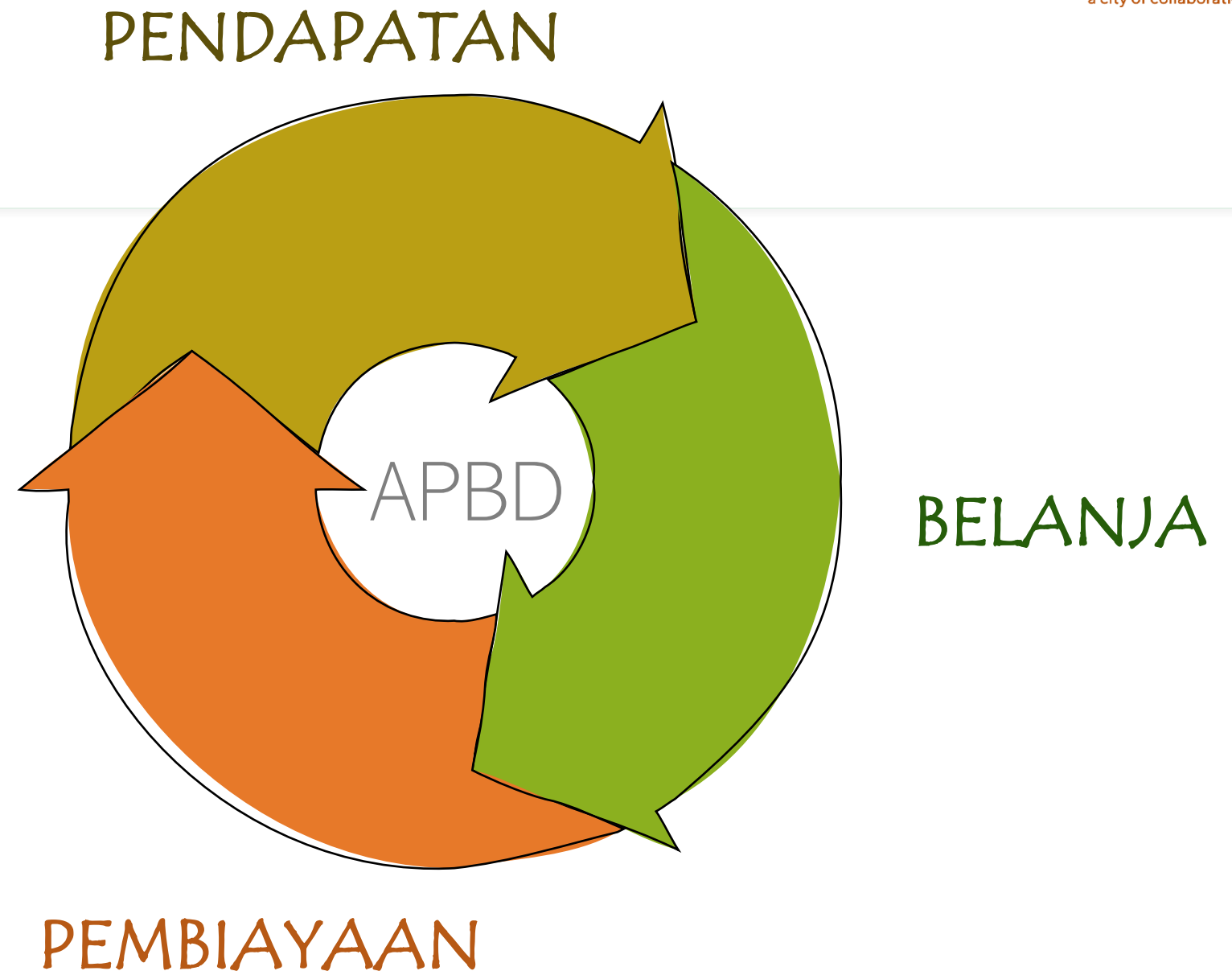
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda



- PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda

# Struktur APBD



# Pendapatan Daerah

1. Pendapatan asli daerah
    - ❑ pajak daerah
    - ❑ retribusi daerah
    - ❑ hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - ❑ lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  
  2. Pendapatan transfer
    - ❑ transfer Pemerintah Pusat
      - dana perimbangan
        - ✓ Dana Transfer Umum (DBH dan DAU)
        - ✓ Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)
      - dana insentif daerah
      - dana otonomi khusus
      - dana keistimewaan
      - dana desa
    - ❑ transfer antar-daerah.
      - pendapatan bagi hasil
      - bantuan keuangan
  
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
    - ❑ hibah
    - ❑ dana darurat
    - ❑ lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
-

# Belanja Daerah

## 1. Belanja operasi

Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek

- belanja pegawai
- belanja barang dan jasa
- belanja bunga
- belanja subsidi
- belanja hibah
- belanja bantuan sosial

## 2. Belanja modal

Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi

## 3. Belanja tidak terduga

Pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

## 4. Belanja transfer

pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya

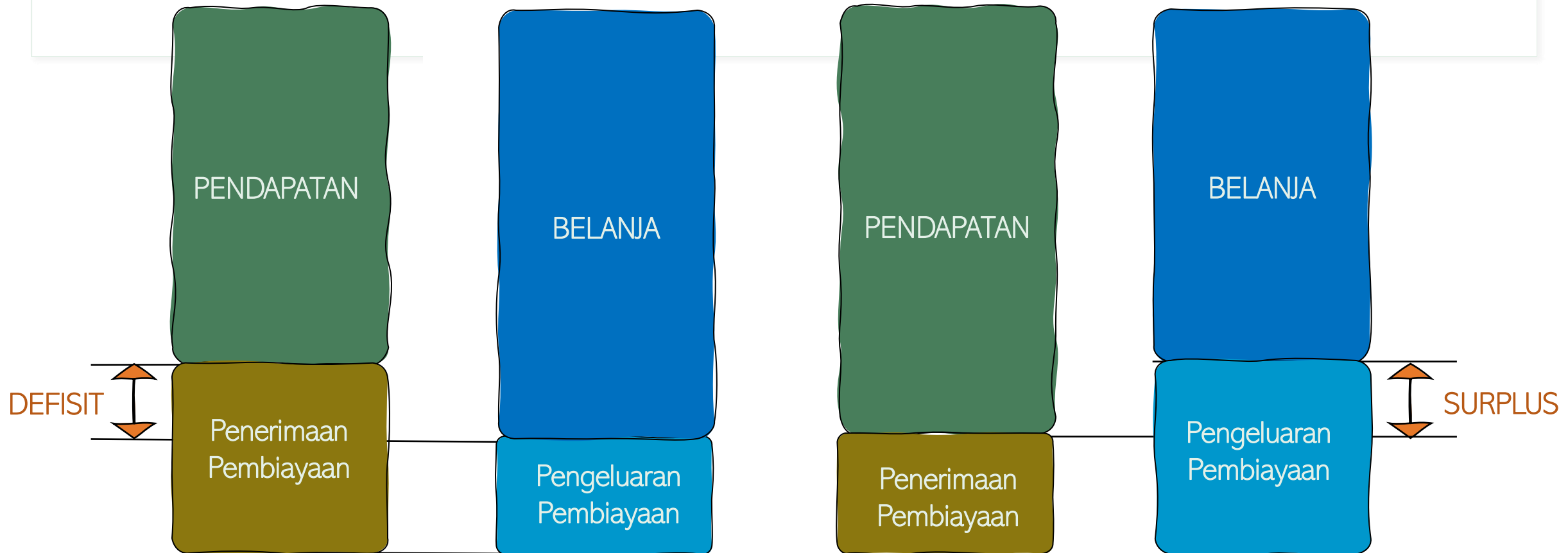
- belanja bagi hasil
  - belanja bantuan keuangan
-



# Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan
    - SiLPA
    - pencairan Dana Cadangan
    - hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    - penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
    - penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
  
  2. Pengeluaran pembiayaan
    - pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo
    - penyertaan modal daerah
    - pembentukan Dana Cadangan
    - pemberian Pinjaman Daerah
    - pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
-

# Logika APBD



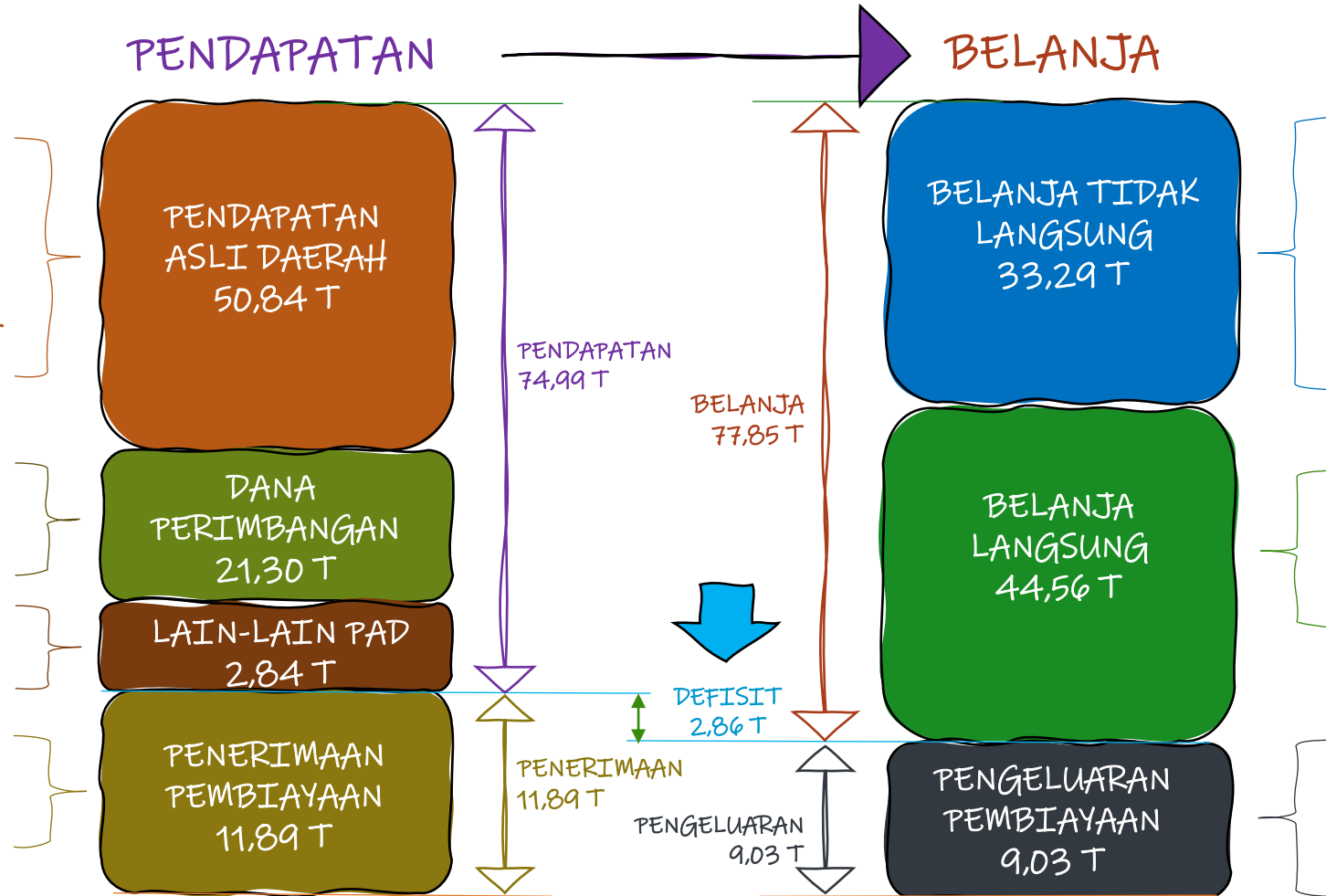
$$\text{APBD} = \text{PENDAPATAN} + \text{Penerimaan Pembiayaan} = \text{BELANJA} + \text{Pengeluaran Pembiayaan}$$

# APBD-Perubahan DKI JAKARTA 2019

- Pajak 44,54 T
- Retribusi 710,13 M
- Pengelolaan Kekayaan Daerah 618 M
- Lain-lain PAD 4,97 T

- DBH 18,15 T
- DAK 3,15 T
- Hibah 2,78 T
- Dana Otsus 57,17 M

- SILPA 9,75 T
- Pinjaman 2,13 T



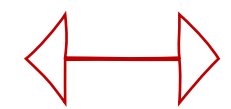
- Pegawai 20,08 T
- Bunga 76 M
- Subsidi 4,79 T
- Hibah, Bansos dan Banku 8,05 T
- Tak Terduga 269,31 M

- Pegawai 3,19 T
- Barang dan Jasa 23,97 T
- Modal 18,04 T

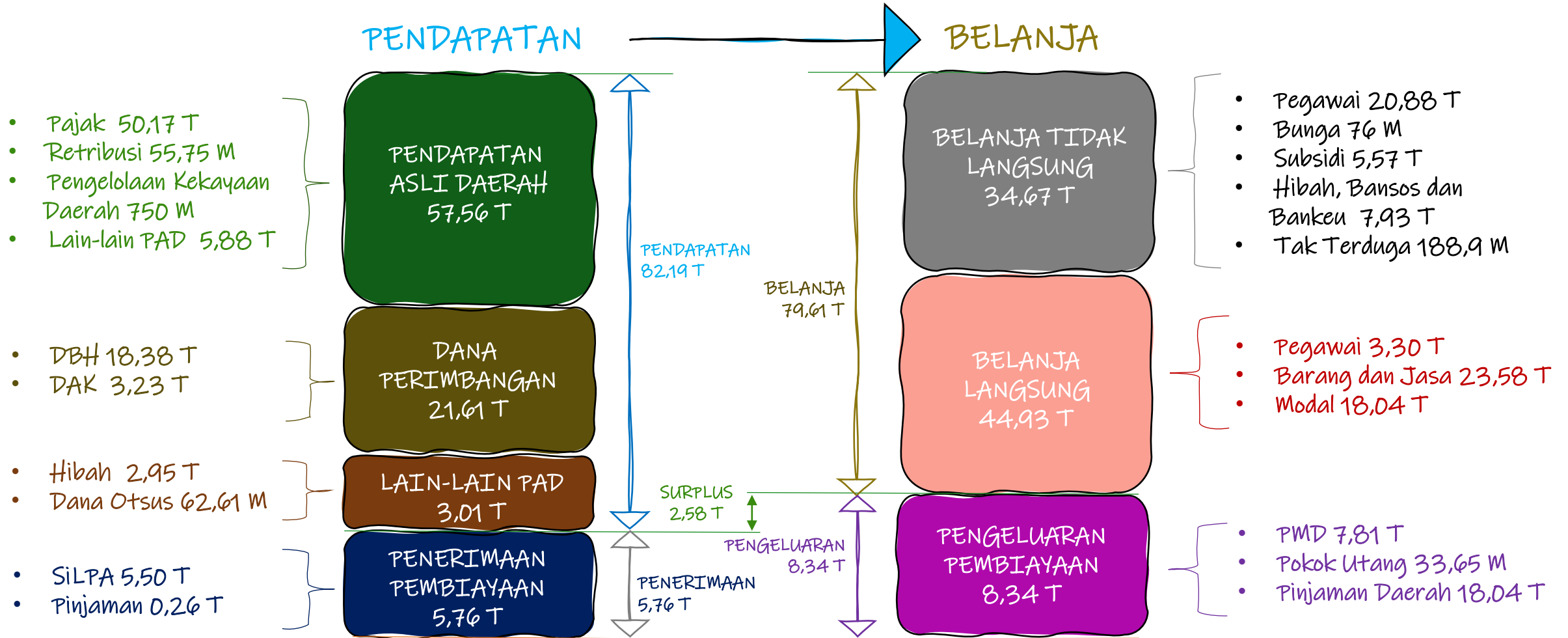
- PMD 8,60 T
- Pokok Utang 33,65 M
- Pinjaman Daerah 350,00 M
- Pinjaman BLUD 48,62 M

PENDAPATAN = 74,99 T  
 PENERIMAAN = 11,89 T  
**APBD = 86,88 T**

BELANJA = 77,85 T  
 PENGELUARAN = 9,03 T  
**APBD = 86,88 T**



# APBD-Penetapan DKI JAKARTA 2020



PENDAPATAN = 82,19 T  
 PENERIMAAN = 5,76 T  
**APBD = 87,95 T**

BELANJA = 79,61 T  
 PENGELUARAN = 8,34 T  
**APBD = 87,95 T**





# TERIMA KASIH

---

MAJU KOTANYA BAHAGIA WARGANYA